

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem sudah berjalan efektif, namun belum optimal. Berikut uraiannya:

1. Formulasi strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas telah disusun secara sistematis dengan memperhatikan keselarasan antara visi–misi daerah, peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal. Strategi ini menekankan pendekatan konvergensi program lintas sektor, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Keselarasan antara arah kebijakan daerah dan kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 menjadi faktor kunci keberhasilan formulasi strategi. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menunjukkan penerapan aspek formulasi strategi yang efektif dan adaptif sesuai dengan kerangka teori Fred R. David, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek data, koordinasi, dan keberlanjutan program untuk memastikan capaian penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Implementasi strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas telah menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi melalui

pendekatan terintegrasi, adaptif, dan berbasis hasil. Sinergi lintas sektor, kepemimpinan yang berorientasi hasil, serta dukungan kelembagaan dan inovasi digital menjadi faktor penggerak utama keberhasilan pelaksanaan strategi. Penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem dari 116.330 jiwa (2020) menjadi 15.209 jiwa (2024) membuktikan bahwa implementasi strategi berjalan efektif dan berdampak nyata. Namun, keberlanjutan capaian tersebut tetap memerlukan penguatan koordinasi antar-OPD, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi peran dunia usaha agar hasil implementasi strategi dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

3. Proses evaluasi strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas telah berjalan efektif dan terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah berhasil menggabungkan evaluasi berbasis data, pengukuran kinerja lintas sektor, serta tindakan korektif adaptif untuk menjaga keberlanjutan strategi. Meskipun masih terdapat tantangan seperti ketidaksinkronan data dan keterbatasan kapasitas SDM, sistem evaluasi yang telah dibangun mampu memastikan strategi penghapusan kemiskinan ekstrem tetap relevan, adaptif, dan terarah pada hasil. Dengan demikian, aspek evaluasi strategi di Kabupaten Banyumas telah sejalan dengan kerangka teori Fred R. David, yaitu sebagai proses berkelanjutan untuk meninjau, mengukur, dan memperbaiki strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

## 5.2 Implikasi

Implikasi berdasarkan kesimpulan mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem adalah sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memastikan bahwa visi dan misi pembangunan secara eksplisit memprioritaskan agenda penghapusan kemiskinan ekstrem lintas sektor. Analisis SWOT harus dilakukan secara berkala agar strategi tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi. Pendekatan *bottom-up planning* perlu diterapkan dengan melibatkan masyarakat miskin dan desa dalam proses perencanaan agar strategi lebih kontekstual dan partisipatif. Pemerintah perlu menyusun rencana aksi jangka panjang penghapusan kemiskinan ekstrem pasca-2024 agar upaya yang telah dilakukan tidak berhenti setelah periode RPJMD berakhir.
2. Optimalisasi implementasi strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas memerlukan peningkatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga eksternal melalui mekanisme *collaborative governance*. Pemanfaatan teknologi digital seperti E-Monev dan Satu Data Kemiskinan perlu diperluas untuk memperkuat integrasi program dan menghindari duplikasi kebijakan. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana program menjadi kunci agar implementasi strategi berjalan efektif dan adaptif. Secara kebijakan Diperlukan kebijakan daerah yang memperkuat integrasi data kemiskinan lintas instansi melalui

pembentukan Pusat Data Kemiskinan Daerah agar kebijakan lebih tepat sasaran.

3. Perbaikan sistem evaluasi dan pengambilan keputusan harus menilai dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan hanya capaian administratif. Pemerintah perlu menggabungkan evaluasi berbasis data (DTKS, P3KE, E-Monev) dengan pendekatan kualitatif melalui survei lapangan. Hasil evaluasi harus dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan anggaran tahun berikutnya melalui mekanisme *policy feedback*, sehingga strategi selalu diperbarui sesuai kondisi terkini. Pemerintah perlu memperluas mekanisme evaluasi berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) agar setiap program memiliki ukuran dampak yang jelas. Perlu diterapkan kebijakan insentif bagi OPD yang menunjukkan capaian kinerja tinggi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, guna meningkatkan motivasi dan akuntabilitas.
4. Penguatan kolaborasi dan keberlanjutan Program, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan ekstrem pasca-intervensi, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi, pelatihan, dan akses modal. Kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga keuangan mikro, dan perguruan tinggi harus ditingkatkan. Pendekatan partisipatif perlu diperkuat agar masyarakat menjadi pelaku aktif dalam mengatasi kemiskinan.